Kebijakan *Work from Home* bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19

Eki Darmawan¹, Muhammad Eko Atmojo²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email Korespondensi: muhammadekoatmojo05@gmail.com

Abstrak:

Pada artikel ini akan membahas mengenai penerapan kebijakan *wrok from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Jika dilihat selama ini proses kinerja ASN di Indonesia lebih banyak bersifat konvensional, sehingga jarang sekali bekerja yang bersifat online. Pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan baru demi pencegahan penularan Covid-19, salah satu kebijakan yang dibuat adalah tentang Wrok From Home (WFH). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bahwa kebijakan WFH yang telah diterapkan belum begitu optimal karena ada berbagai macam factor diantaranya adalah belum meratanya sebaran infrastruktur teknologi informasi, belum semua daerah mempersiapkan system dokumentasi berbasis teknologi, dan belum semua instansi siap dalam memberikan layanan berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kebijakan WFH belum begitu optimal untuk dilaksanakan, walaupun memang sudah ada beberapa daerah yang bisa mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik seperti kota-kota besar di Indonesia.

Kata kunci; Kebijakan, Work From Home, Kinerja, dan Pandemi Covid-19

Abstract:

This article will discuss the implementation of the work from home (WFH) policy for the state civil apparatus (ASN) in Indonesia. If seen so far, the performance process of ASN in Indonesia is more conventional, so it is rare to work online. The Covid-19 pandemic has forced the government to make new policies to prevent the spread of Covid-19, one of the policies made is about Work from Home (WFH). Based on the results of the analysis carried out, the WFH policy that has been implemented has not been optimal because there are various factors including the uneven distribution of information technology infrastructure, not all regions have prepared technology-based documentation systems, and not all agencies are ready to provide application-based services or information technology. This is the reason why the WFH policy is not optimal to implement, even though there are already several regions that can implement this policy properly, such as big cities in Indonesia.

Keywords: Policy, Work From Home, Performance, the Covid-19 Pandemic

Article History :

Received 25-08-2020; Revised 28-08-2020; Accepted 01-09-2020

PENDAHULUAN

Melihat berjalannya roda pemerintahan tentu berkaitan erat dengan penggerakannya yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pemerintahan, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu ASN, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, jika ditengah masa pandemi Covid-19 yang saat ini melanda seluruh dunia termasuk di negara Indonesia, bagaimana roda pemerintahan dapat berjalan dan ASN dapat terus melayani masyarakat sesuai amanat Undang-undang. Kita ketahui, setelah kasus pertama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa wabah Covid-19 tersebut merupakan sebuah pandemi global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan internasional (<https://www.who.int>, 2020).

Melihat situasi yang cukup kritis tersebut, Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dan merespon hal tersebut dengan ditetapkannya beberapa kebijakan nasional, diantaranya adalah seruan untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH), pemberlakuan *social distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Al-Hamdi & Atmojo, 2020). Pengeluaran kebijakan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan Covid-19. Selain mengeluarkan kebijakan pemerintah juga merespon dengan beberapa peraturan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, Presiden juga melakukan gerak cepat dengan menetapkan Covid-19 sebagai bencana berskala nasional, hal ini ditandai dengan penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Ihsanuddin, 2020). Dalam penyebaran virus Covid-19 dirasa sangat membahayakan dan dianggap sebagai suatu bencana darurat nasional yang harus segera diatasi dengan cepat. Pada masa pandemi ini kebijakan-kebijakan yang diambil tertentu dibuat khusus oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pengambilan kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ini sebagai langkah dalam penanganan Covid-19. Penerapan kebijakan tersebut ditujukan kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk ASN kebijakan yang diberlakukan adalah WFH, dimana dengan melakukan kebijakan WFH ini diharapkan masyarakat tetap menerima pelayanan dengan baik.

Kebijakan WFH yang diterapkan kepada ASN merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Akan tetapi dengan adanya kebijakan ini bukan berarti ASN libur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan ASN tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengambilan kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19 semakin meluas. Jika dilihat memang kebijakan WFH sudah bergulir di public sejak tahun 2019, tetapi pada waktu itu banyak sekali pro dan kontra terhadap rencana kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan WFH belum bisa dilakukan sesuai dengan rencana, pada tahun 2020 merupakan moment yang tepat untuk melaksanakan kebijakan WFH bagi ASN. Tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut karena adanya paksaan yang disebabkan oleh Covid-19. Sehingga banyak sekali permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan kebijakan ini diimplementasikan kepada ASN.

Salah satu permasalahan yang muncul dengan adanya penerapan kebijakan WFH di saat pandemic adalah masih banyak sekali perusahaan maupun instansi pemerintah yang belum siap dalam menerapkan kebijakan WFH tersebut (Purwanto, 2020). Belum semua

instansi pemerintah mempunyai data yang terintegrasi sehingga ketika ASN membutuhkan data harus mengambil dalam bentuk fisik ke kantor (Krisyohana, 2020). Pelayanan public menjadi tidak maksimal karena system yang ada belum mendukung untuk pelaksanaan pelayanan secara online (Krisyohana, 2020). Dari beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan WFH belum sepenuhnya siap untuk diterapkan bagi ASN, mengingat banyak sekali keluhan maupun permasalahan yang dialami oleh ASN dan instansi pemerintah. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan organisasi dimasa pandemic ini, dimana menurut Maria (1998) dalam (Muchtar, 2020) menyatakan bahkan perubahan organisasi merupakan suatu kegiatan yang menyusun kembali perangkat organisasi guna mencapai tujuan dan efisensi serta efektivitas dalam berorganisasi. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kesiapan ASN dalam mengimplementasikan kebijakan WFH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka menurut Zed (2004) dalam (Taufik & Warsono, 2020) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Model pelaksanaan penelitian ini lebih menekankan penggunaan data-data skunder seperti pencermatan dari artikel maupun jurnal serta website pemerintah. Adapun pelaksanaan penelitian difokuskan pada pelaksanaan penerapan kebijakan WFH bagi ASN selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah adalah langkah/keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan untuk kepentingan masyarakat. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, Ketentuan-Ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan (Darmawan, Septian, & Pratama, 2017).

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan, salah satunya kebijakan tentang perubahan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Dengan adanya kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah maka ada beberapa konsekuensi yang akan dialami oleh masyarakat secara luas. Mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang tentunya akan mempunyai dampak pada beberapa proses normal biasanya dari sisi pemerintahan. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan public dan *political will* dari pemangku kebijakan di instansi pemerintahan serta ASN dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan system kerja baru bagi ASN ini merupakan sebuah inovasi yang sudah mulai direncanakan sejak tahun 2019, namun belum dilaksanakan karena terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akan tetapi sejak terjadinya Covid-19 maka kebijakan

bekerja dari rumah bagi ASN harus dilakukan, demi pencegahan penularan Covid-19. Selain itu tujuan dari pemberlakuan WFH dimasa pandemic adalah untuk memastikan semua pelayanan bisa berjalan dengan baik, serta tugas pokok dan fungsi instansi tetap berjalan. Penerapan kebijakan WFH ini didukung dengan Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut maka pimpinan daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pimpinan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan berbagai macam inovasi untuk tetap memberikan pelayanan public kepada masyarakat.

Berbagai macam inovasi ini tentu harus didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi. Mengingat selama ini ASN atau sumber daya aparatur di Indonesia belum pernah melakukan WFH, sehingga kebijakan WFH ini merupakan kebijakan yang memaksa ASN untuk mencoba hal baru dalam kehidupannya. Memang pemerintah pusat sudah mempunyai wacana untuk memberlakukan WFH bagi ASN mulai awal Januari 2020, akan tetapi hal ini mempunyai berbagai faktor sehingga sampai Bulan Februari akhir belum bisa dilaksanakan. Sejak terjadinya Covid-19 barulah pemerintah memberlakukan kebijakan WFH dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 dan keselamatan para ASN.

Jika dilihat semenjak diberlakukannya WFH sampai hari ini memang masih banyak sekali kekurangan yang dirasakan, terutama dalam hal pelayanan public. Mengingat belum semua OPD siap dalam memberikan pelayanan public secara *daring/online*. Tentu hal ini kita sadari bahwa memang belum semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat *online*, masih banyak sekali pelayanan yang sifatnya *offline*. Walaupun saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 instansi pemerintah di Indonesia belum semuanya siap dalam menerapkan pelayanan public secara *online*. Mengingat untuk melaksanakan pelayanan secara online maka dibutuhkan kesiapan dari aparaturnya sendiri serta masyarakat. Mengingat kedua belah pihak ini merupakan hal yang paling penting untuk mendukung berjalannya pelayanan public secara *online*. Pada kaitannya dengan WFH yang diberlakukan sekarang menurut (Keith, Zefanya, & Wibisana, 2020) bahwa ada berbagai macam aspek yang harus ditinjau dalam penerapan kebijakan WFH diantaranya pendidikan, indeks prestasi dan kondisi ASN dalam menerapkan teknologi informasi. Dari aspek tersebut (Keith et al., 2020) menyimpulkan bahwa ASN di Indonesia belum siap untuk menerapkan melaksanakan kebijakan WFH, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dalam kesehariannya.

Belum adanya kesiapan tersebut membuat pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat akan mendapatkan kendala atau hambatan. Terutama bagi OPD yang belum mempersiapkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Mengingat pelayanan public merupakan salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini juga dinyatakan oleh (Wahyuni & Maesaroh, 2018) bahwa pelayanan public juga dapat menjadi titik strategis dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan. Selain itu (Ibrahim, 2018) juga menyatakan bahwa kedudukan masyarakat menjadi semakin penting dan krusial dalam proses penyelenggaraan pelayanan public.

Pada era revolusi industri 4.0 pelayanan public memang seharusnya sudah berbasis teknologi informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Selain itu pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing juga menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan di era digital ini (Menpan.go.id, 2020). Maka salah satu wujud untuk mendukung terwujudnya pelayanan public di era digital tersebut pemerintah pusat telah menginisiasi pembentukan *Smart ASN*. Konsep gerakan *Smart ASN* ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan public di era revolusi industri 4.0. Demi terwujudnya *Smart ASN* yang handal maka diperlukan kompetensi yang sangat mendukung diantaranya adalah dalam penguasaan teknologi informasi. Hal ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan bagi ASN di Indonesia untuk mulai hijrah dalam penggunaan teknologi informasi. Mengingat di era revolusi industri ini menurut Erol et.al dalam (Keith et al., 2020) bahwa sumber daya aparatur khususnya ASN harus mempunyai (1) *personnel competencies*, (2) *interpersonal competencies*, (3) *action-related competencies*, dan (4) *domain-related competencies*.

Konsep *Smart ASN* yang telah di gagas oleh pemerintah ini baru bisa diimplementasikan pada tahun ini, khususnya sejak adanya Covid-19. Momen Covid-19 ini seharusnya dijadikan pemerintah sebagai implementasi *Smart ASN* sekaligus serta menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam hal penggunaan teknologi. Selain itu moment ini juga bisa dijadikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang menggunakan teknologi informasi. Hal ini bisa dijadikan oleh setiap OPD maupun pemerintah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang mendukung pelayanan public, seperti e-musrenbang, e-kinerja dan lain sebagainya. Memang jika dilihat dari sisi kesiapan ASN amupun masyarakat dalam menerapkan teknologi informasi masih belum sepenuhnya siap, hal ini juga dikarenakan belum meratanya infrastruktur yang mendukung teknologi informasi di Indonesia.

Jika dilihat memang masih banyak sekali permasalahan di Indonesia mengenai kesiapan pemerintah khususnya ASN dan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Padahal jika dilihat dari sisi efektivitas dan efisiennya penggunaan teknologi informasi sangatlah efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat dari pengertian efektivitas menurut menurut (Effendy, 2017) bahwa efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang tepat dan jumlah personil yang telah ditentukan. Jika dilihat dari pengertian tersebut maka penggunaan teknologi informasi sangatlah efektif dan efisien, bagi dalam segi waktu, biaya dan lain sebagainya. Akan tetapi pada implementasi yang dilakukan banyak sekali permasalahan yang masih dihadapi, apalagi jika kita lihat perubahan penerapan teknologi informasi ini seolah dipaksakan karena adanya Covid-19. Jikapun tidak ada Covid-19 seyogyanya pemerintah dan ASN belum semuanya siap dalam menjalankan pelayanan public dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan banyak factor baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kesiapan ASN sendiri.

Adanya Covid-19 ini hampir semua sector di Indonesia beralih kepada penggunaan teknologi informasi, baik dari pelayanan public sampai dengan pelaksanaan pendidikan. Peralihan penggunaan teknologi ini nyatanya masih menyisakan permasalahan yang sangat serius seperti halnya yang termuat dalam berita online jawapos.com bahwa berdasarkan

pernyataan (Jones, 2020) seorang guru di daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang mengeluhkan terbatasnya ketersediaan listrik dan signal telekomunikasi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengingat sector pendidikan merupakan salah satu sector yang paling penting dalam bernegara. Selain itu dalam bidang pelayanan public di instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti halnya kebijakan system kerja bagi ASN yang menerapkan WFH hal ini masih menyisakan permasalahan terutama dalam hal dokumen kinerja, mengingat belum semua instansi pemerintah mengakomodir dokumen dalam bentuk elektronik (Jones, 2020).

Dengan berbagai macam permasalahan yang ada menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi di dunia kerja belum sepenuhnya siap. Walaupun ada beberapa daerah yang memang sudah siap dalam penerapan teknologi informasi, akan tetapi masih ada juga daerah yang belum siap sama sekali karena terkendala infrastruktur penyedia teknologi informasi. Hal tersebut juga dinyatakan oleh (Samarah, 2020) bahwa tingkat kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan WFH belum merata, ketidakmerataan tersebut meliputi proses selama system kerja berlangsung, ataupun mengenai sumber daya aparatur dalam hal ini ASN sebagai pelaksana.

Dengan masih minimnya kesiapan mengenai penerapan teknologi informasi dalam pelayanan public ini seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan transisi kerja konvensional ke digital di masa mendatang (Samarah, 2020). Seyogyanya memang di era sekarang sudah banyak sekali perilaku kerja yang menggunakan teknologi informasi atau perubahan pola kerja dari konvensional ke digital. Maka dari itu harus ada pelaksanaan pengembangan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya khususnya dalam hal penggunaan teknologi informasi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Adi bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan kompetensi bagi ASN dimasa pandemic tidak boleh berhenti, hal ini justru dijadikan momentum untuk menutupi keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi (Menpan.go.id, 2020). Selain itu Agus Heruanto Hadna dalam (Dinata, 2020) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kualitas ASN di masa pandemic Covid-19 perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya infrastruktur layanan internet yang mumpuni dari Sabang sampai Merauke serta kemampuan ASN dalam mengoprasikannya.

Jadi untuk mewujudkan ASN menuju *digital government* atau program pemerintah yang dikenal dengan *Smart ASN* perlu banyak hal yang harus diperbaharui. Diantaranya mengenai infrastruktur dan keterampilan atau kesiapan ASN dalam penggunaan teknologi informasi. Jika kedua hal ini sudah diimplementasikan dengan baik maka saya rasa ASN akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Apalagi jika dilihat pada saat ini Indonesia maupun ASN menuju kepada tatanan baru atau *new normal*. Sehingga sangat wajar jika diperlukan persiapan yang matang untuk mewujudkan hal tersebut. Pandemi ini merupakan moment terbaik untuk mewujudkan *smart ASN* atau ASN menuju *digital government*. Walaupun kita tahu bahwa saat ini kebijakan WFH merupakan kebijakan darurat yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesehatan, sehingga banyak sekali ASN yang belum begitu siap dalam melaksanakan tugasnya dengan system teknologi informasi. Karena hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti infrastruktur jaringan, belum

semua daerah menyiapkan dokumen dalam bentuk digital serta belum semua ASN siap dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan WFH ini menjadikan ASN lebih dekat kepada teknologi informasi, sehingga kedepan jika program *Smart ASN* diterapkan oleh pemerintah harapannya sudah bisa berjalan dengan baik dan ASN juga sudah siap menjalankannya.

KESIMPULAN

Covid-19 memaksa semua sector untuk merubah kebiasaannya, salah satunya seperti bekerja dan lain sebagainya. Adanya Covid-19 ini akan sangat berdampak serius bagi pemerintah, ekonomi dan lain sebagainya, selain itu dengan adanya Covid-19 ini juga berdampak pada kinerja ASN di Indonesia. Salah satunya dengan adanya kebijakan WFH bagi ASN, hal ini dilakukan guna mengurangi resiko penularan Covid-19, sehingga pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru demi terjaganya kesehatan dan keselamatan ASN akan tetapi tetap bisa berkarya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan WFH bagi ASN ini berdampak sangat serius terutama dalam hal kinerja, mengingat selama ini system kerja ASN bersifat konvensional, tetapi dengan adanya Covid-19 harus berubah menjadi *online*. Pada akhirnya perubahan ritme kinerja ASN menimbulkan banyak permasalahan dari mulai infrastruktur sampai dengan kesiapan ASN dalam menggunakan teknologi informasi.

Selain itu kebijakan WFH yang diterapkan selama pandemic Covid-19 belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa factor yang menyebabkan kebijakan tersebut belum begitu optimal salah satunya adalah belum meratanya infrastruktur jaringan internet maupun listrik di Indonesia, sehingga menyebabkan kesulitan akses dan kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi. Kedua, belum semua daerah siap dalam hal pendokumentasian digital, karena selama ini arsip kinerja ASN maupun daerah dilakukan secara konvensional atau manual. Ketiga, belum semua instansi siap dalam penyediaan layanan berbasis teknologi informasi. Maka dari itu dari beberapa alasan tersebut dapat diambil saran bahwa adanya pandemic Covid-19 ini harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk lebih dekat dengan teknologi informasi, baik dari instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan public maupun kesiapan ASN terhadap teknologi informasi. Selain itu momentum ini juga bisa dijadikan sebagai momen yang tepat dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga semua daerah terjangkau dan bisa terintegrasi dengan teknologi informasi.

REFERENSI

- Al-Hamdi, R., & Atmojo, M. E. (2020). *Covid-19 dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Darmawan, E., Septian, D., & Pratama, R. A. (2017). *Kebijakan Sektor Publik*. Tanjung Pinang: UMRAH Perss.
- Dinata, A. (2020). Teknologi Mendukung Birokrasi di Masa Pandemi. Retrieved from Gatra.com website: <https://www.gatra.com/detail/news/482995/teknologi/teknologi-mendukung-birokrasi-di-masa-pandemi>
- Effendy, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Peran Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Yang Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt. Putra Cita Nusa). *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 4(1).
- Ibrahim, I. (2018). Implementasi Kebijakan DIKLATPIM IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.175>
- Ihsanuddin. (2020). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana

- Nasional. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>
- Joned. (2020). Pandemi Covid-19 sebagai Momentum New Normal Inovasi Pelayanan Publik. Retrieved from jawapos.com website: <https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/06/01/196836/pandemi-covid-19-sebagai-momentum-new-normal-inovasi-pelayanan-publik>
- Keith, B., Zefanya, C., & Wibisana, R. (2020). Meninjau Kesiapan ASN Menjalani Kebijakan Work From Home. Retrieved from suara.com website: <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/04/100012/meninjau-kesiapan-asn-menjalani-kebijakan-work-from-home?page=1>
- Krisyohana, M. (2020). Kesiapan Manajemen ASN untuk WFH. Retrieved from detikNews website: <https://news.detik.com/kolom/d-5049198/kesiapan-manajemen-asn-untuk-wfh>
- Menpan.go.id. (2020). Pandemi Bukan Alasan ASN Tidak Produktif. Retrieved from Humas MenpanRB website: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pandemi-bukan-alasan-asn-tidak-produktif>
- Muchtar, W. (2020). ASN dan New Normal: Pelaksanaan kerja ASN di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved from suara.com website: <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/03/164058/asn-dan-new-normal-pelaksanaan-kerja-asn-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1).
- Samarah, G. (2020). Melihat Keberlanjutan Kebijakan WFH dalam Menunjang ASN di Era Digital. Retrieved from suara.com website: <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/123616/melihat-keberlanjutan-kebijakan-wfh-dalam-menunjang-asn-di-era-digital?page=1>
- Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru untuk Ne Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18.
- Wahyuni, N., & Maesaroh. (2018). Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>